



Pentingnya Akuntansi Sektor Publik di Institusi Pemerintahan

The Importance of Public Sector Accounting in Government Institutions

Alistraja Dison Silalahi¹ , Marihot maullang^{2*}

¹Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan

²Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Corresponding author*: manullang.prof@gmail.com

Abstrak

Lembaga pemerintah adalah semua lembaga pemerintah dengan tugas atau fungsi administrasi pemerintah yang ada di lingkungan operasional, dari yang di pusat ke yang di daerah, termasuk komisi, badan, dan dewan yang menerima dana dari APBN atau APBD. Keinginan untuk transparansi publik membutuhkan pengembangan sistem untuk mencapai kinerja maksimum, pemerintahan yang baik, dan akuntabilitas untuk mewujudkan pemerintah bebas dari tindakan penipuan yang mempengaruhi negara. Sistem akuntansi sektor publik adalah sistem yang digunakan oleh lembaga pemerintah atau organisasi layanan publik untuk memberikan akuntabilitas kepada masyarakat umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari dan memahami pentingnya menerapkan akuntansi sektor publik di dalam lembaga pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Menurut temuan penelitian ini, setiap lembaga pemerintah harus menerapkan akuntansi sektor publik karena dapat menyederhanakan dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

Kata Kunci: Akuntansi Publik, Pemerintahan, Akuntabilitas

Abstract

Government agencies are all government agencies with tasks or functions of government administration that exist in the operating environment, from those in the center to those in the area, including commissions, bodies, and councils that receive funds from APBN or APBD. The desire for public transparency necessitates the development of a system in order to achieve maximum performance, good governance, and accountability in order to realize a government free of acts of fraud that affect the country. A public-sector accounting system is one that is used by government agencies or public service organizations to provide accountability to the general public. The purpose of this research is to learn about and comprehend the significance of implementing public sector accounting inside a government institution. This research uses qualitative and descriptive methodologies. According to the findings of this study, every government agency should apply public sector accounting since it can simplify and increase the quality of financial reporting.

Keyword: Public Accounting, Government and Accountability

PENDAHULUAN

Implementasi adalah pelaksanaan persiapan yang telah direncanakan dengan matang dan menyeluruh. Implementasi biasanya dilakukan setelah rencana telah ditafsirkan dengan benar dan dengan mencari hasil terbaik. Dan agar rencana semacam itu dapat dilaksanakan dengan lancar, itu harus didukung oleh elemen tambahan. Pada dasarnya, misi yang diuraikan dalam paragraf keempat dari Introduction to the Basic Law (UUD) tahun 1945 adalah prasyarat bagi otoritas pemerintah untuk mengatur urusan pemerintah pusat dan regional. Selain itu, agensi adalah salah satu cara untuk menentukan pencapaian misi atau rencana dengan tepat sehingga cita-cita suatu negara dapat dicapai dan dilaksanakan secara efektif. Melalui informasi akuntabilitas kinerja masing-masing lembaga pemerintah yang ada, hasil yang dicapai oleh kegiatan lembaga pemerintah dalam pelaksanaan pekerjaan pemerintah sesuai dengan wilayah yang dipercayakan dapat ditentukan. Pemerintah membutuhkan informasi tentang akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, berdasarkan informasi tersebut, pemerintah memiliki sumber daya atau alasan untuk melakukan perbaikan administratif untuk lebih menyeimbangkan manajemen operasi atau kepentingan pemerintah [1].

Akuntansi sektor publik, dalam evolusinya, yang disebut sebagai akuntansi untuk dana publik, adalah metode akuntabilitas dan audit yang diperintahkan untuk pemeliharaan dana publik. Dana sosial adalah dana yang dimiliki oleh masyarakat dibandingkan dengan individu. Dana ini biasanya didanai atau dikelola oleh entitas sektor publik atau kemitraan publik swasta. Akuntansi sektor publik adalah sarana akuntansi dan analisis untuk pengelolaan dana publik di organisasi pemerintah pusat, lembaga tingkat tinggi negara dan departemen, lembaga pelayanan publik, organisasi pemerintah daerah, lembaga layanan publik yang berlokasi di daerah, selain masyarakat, organisasi sosial, dan lembaga sosial, serta dalam proyek perencanaan kolaboratif antara entitas tersebut. Dalam akuntansi sektor publik, data akuntan digunakan untuk menginformasikan otoritas eksekutif, legislatif, dan pengadilan, serta masyarakat umum, tentang situasi ekonomi dan keuangan di sektor publik. Akuntansi di sektor publik didefinisikan sebagai sistem akuntansi yang digunakan oleh organisasi publik sebagai sarana pelaporan publik. Peningkatan penekanan saat ini ditempatkan pada praktik akuntansi lembaga publik, apakah mereka adalah akuntan sektor publik atau organisasi non-pemerintah publik. Publik mengharapkan badan akreditasi untuk berperilaku dengan cara yang transparan dan bertanggung jawab. Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik pada akhirnya akan memberikan kerangka kerja untuk operasi fase siklus akuntansi di sektor publik. Siklus mana yang mencakup persiapan, perkiraan, eksekusi anggaran, pasokan produk dan layanan, pelaporan, audit, dan akuntabilitas publik? Financial Accounting Standard (SAK), Public Accounting Profession Standard (SPAP), Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan Standar Inspeksi Keuangan Negara (SPKN) adalah standar akuntansi yang digunakan di Indonesia. Semua standar ini adalah referensi yang ditentukan dan disetujui oleh badan pengatur di bidang masing-masing [2].

Lembaga pemerintah adalah semua atau semua yang terdaftar dalam lembaga pemerintah yang melakukan tugas atau memberikan manfaat dari pemerintah baik di dalam maupun di sekitar lingkungan eksekutif pusat dan regional, termasuk komisi dan komisi, komite, dewan, dan lembaga yang menerima dana dari APBN/APBD. Ini membutuhkan pers yang terbuka, berfungsi dengan baik, dan bertanggung jawab untuk

mencapai pemerintah bebas dari penipuan yang merugikan negara dan masyarakat (kejujuran, keterbukaan, transparansi, dan akuntansi) atau tanggung jawab sosial. Persyaratan transparansi ini sering ditujukan kepada pemerintah pusat dan regional. Keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan regional adalah sistem keuangan publik dalam kerangka negara yang bersatu, yang mencakup distribusi dana antara pemerintahan pusat dan pemerintah lokal, serta distribusi atau persamaan bidang profesional, demokrasi, keadilan, dan transparansi. Selain itu, mengevaluasi potensi, kondisi, dan persyaratan daerah. Sesuai dengan tanggung jawab, pembagian wewenang, dan pengaturan untuk penggunaan kekuasaan tersebut, termasuk pengelolaan pengawasan keuangan [3].

Pemerintah setempat berfungsi sebagai wilayah otonom yang memiliki kebijakan sendiri untuk mempertahankan keuangan di wilayahnya. Tetapi, tentu saja, harus tetap selaras dengan undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang ada. Pemerintah suatu wilayah bertanggung jawab atas pemeliharaan keuangannya, dan pihak-pihak yang terlibat dalam urusan keuangan daerah bertujuan untuk bertanggung jawab untuk melakukan inspeksi internal dan eksternal atas implementasi keuangan di wilayah tersebut. Inspeksi internal implementasi keuangan di daerah, selain mengawasi urusan tunai atau uang tunai, juga memantau implementasi rencana, kegiatan, dan manajemen perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah setempat melalui efektivitas dan efisiensi, yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kinerja keuangan daerah. Seperti yang ditunjukkan dalam perhitungan empat laporan kinerja keuangan untuk menentukan tingkat dan efektivitas wilayah dalam mencapai program regional. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh otoritas di bidangnya untuk memberikan laporan transparan dan akurat tentang pelaksanaan anggaran. Ulasan ini bertujuan untuk memahami pentingnya menerapkan akuntansi sektor publik di lembaga pemerintah [4].

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode analisis deskriptif dan pendekatan kualitatif telah digunakan. Setelah itu, penelitian data kualitatif dilakukan, diselidiki, dan dianalisis untuk membuat kesimpulan. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menjelaskan, menyelidiki, atau mempelajari hasil penelitian tetapi tidak untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih luas. Selain itu, Sugiono menyatakan bahwa pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filsafat post-naturalisme yang mempertimbangkan keadaan objek salam, di mana peneliti adalah elemen utama, teknik pengumpulan data adalah triangulasi, dan analisis data adalah induktif, atau temuan penelitian kualitatif dan kuantitatif mendukung arti atas generalisasi. Dengan memperhatikan hal tersebut, pelaksanaan penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif atau metode deskriptif kuantitatif dengan maksud mengekspresikan fakta atau peristiwa, keadaan, peristiwa atau fakta, dan variabel yang telah terjadi selama studi ini menyajikan hasil penelitian dengan menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi. Studi ini menafsirkan dan menggambarkan data tentang keadaan saat ini dan masa depan. Kemudian dibandingkan dengan aturan yang ditentukan sebelumnya. Teknik untuk pengumpulan data yang dipelajari melalui penelitian perpustakaan Setelah pengurangan data, presentasi data, analisis data, dan merumuskan kesimpulan, data tersebut kemudian dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntansi Publik

Akuntansi sektor publik di Indonesia dapat didefinisikan sebagai metode penilaian teknis dan akuntansi dalam pengelolaan dana rakyat oleh pemerintah pusat, lembaga-lembaga tinggi suatu negara, departemen, badan-badan pelayanan publik, pemerintah daerah, badan pelayanan publik di daerah, lembaga sosial di masyarakat, yayasan sosial, serta dalam proyek-proyek kerjasama antara organisasi sektor publik dan organisasi sektor swasta [2].

Dalam akuntansi sektor publik, informasi akuntan akan digunakan untuk memberikan informasi kepada eksekutif, legislatif, eksekutor pengadilan, dan eksekutif publik tentang kondisi ekonomi dan keuangan sektor publik. Standar dan Teori Akuntansi Sektor Publik Teori ini terkait erat dengan akuntansi keuangan, khususnya pelaporan informasi keuangan kepada pihak ketiga. Teori akuntansi di sektor publik ini menimbulkan pertanyaan apakah teori seperti itu ada. Menurut beberapa ilmuwan, sektor swasta, di mana akuntansi berkembang dengan kecepatan yang lebih cepat, belum mengembangkan teori akuntan. Teori harus didukung oleh banyak penelitian yang berisi hipotesis yang kebenarannya diuji. Teori ini memiliki tiga karakteristik fundamental: (1) kemampuan untuk menjelaskan atau menjelaskan fakta (menjelaskan); (2) prediktabilitas; dan (3) generalisasi. (kemampuan mengendalikan fenomena) [5].

Pada dasarnya, studi teori akuntansi melayani tiga tujuan: memahami implementasi akuntan saat ini, menganalisis kelebihan dan kekurangan implementasi saat ini dan memperbaiki implementasinya di masa depan. Mengembangkan teori sektor publik memungkinkan peningkatan praktek saat ini. yang dibatasi oleh upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang memberikan informasi keuangan yang relevan dan melalui komunikasi lisan. Akuntan sektor publik harus mengatasi sejumlah hambatan untuk menghasilkan laporan keuangan yang memadai dan dapat diandalkan. Objektivitas, konsistensi, perbandingan, aktualitas, ekonomi pelaporan, dan materialisme adalah hambatan.

Objektifitas

Kurangnya objektivitas adalah salah satu hambatan terbesar untuk membuat laporan keuangan yang tepat. Manajemen menyajikan laporan keuangan untuk menjelaskan kepada pemangku kepentingan eksternal organisasi, selama periode waktu tertentu, kinerja yang manajemen akhirnya akan dapat menjelaskan. Seringkali, ada banyak masalah dampak dengan objektivitas laporan kerugian sebagai akibat dari dampak kepentingan, khususnya antara kepentingan manajemen dan kepentingan pemangku kepentingan. Manajemen tidak selalu bertindak dalam kepentingan terbaik dari para pemangku kepentingan; sebaliknya, mereka sering bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri dan melindungi posisi mereka, terlepas dari ancaman yang ditimbulkan terhadap pemangkas lainnya, termasuk karyawan, investor, kreditur, dan masyarakat.

Konsistensi

"Konsisten" dapat merujuk pada penggunaan metode atau teknik akuntansi yang sama selama beberapa periode waktu untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi. Tujuannya adalah untuk membandingkan kemampuan laporan keuangan dari tahun ke tahun. Sebuah organisasi memiliki tujuan jangka panjang, sedangkan laporan keuangan hanya dapat memberikan informasi tentang kinerja selama periode waktu yang terbatas, sehingga konsistensi metode akuntansi sangat penting. Agar ini menjadi prosedur untuk menilai kemampuan organisasi dari luar, sebuah organisasi harus menerapkan metode akuntansi dengan konsistensi yang lebih besar.

Superioritas Kontras

Laporan keuangan sektor publik harus mencakup perbandingan periode-periode dengan organisasi yang sebanding. Dengan begitu, perbandingan menyiratkan bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kemampuan organisasi dengan kemampuan organisasi alternatif potensial. Masalah pembatasan perbandingan terkait dengan objektivitas karena semakin rasional laporan keuangan, semakin dapat dibandingkan karena berbagai laporan dapat dihasilkan menggunakan informasi yang sama. Perbandingan berlanjut dengan ketentuan. dengan saat ini Alternatif lain untuk metode akuntansi juga dapat membuat perbandingan lebih rumit.

Waktu Yang Tepat

Laporan keuangan harus diproduksi pada waktu yang tepat sehingga keputusan ekonomi, sosial, dan politik dapat dibuat dengan penundaan minimal. Batas waktu adalah batas waktu optimal untuk penetapan laporan keuangan. Masalahnya adalah bahwa semakin lama diperlukan untuk menghasilkan informasi, semakin banyak informasi yang dibutuhkan. Bahkan jika disajikan lebih awal, laporan keuangan dapat disajikan pada saat yang tidak cocok untuk pengambilan keputusan.

Akuntansi dalam Ekonomi

Biaya pelaporan keuangan sangat tinggi. Biaya permintaan akan meningkat seiring meningkatnya jumlah informasi yang diminta. Adalah mungkin bahwa hambatan ekonomi untuk menyajikan laporan keuangan melebihi manfaat dan biaya persiapan laporan keuangan.

Materialisasi

Informasi juga dianggap penting jika dapat mengubah keputusan atau jika penghapusannya akan mengakibatkan keputusan baru. Penentuan materialitas seperti itu subjektif, tetapi tidak dapat dikurangi menjadi masalah preferensi pribadi. Standar Akuntansi adalah panduan umum atau prinsip-prinsip panduan yang mengatur operasi perusahaan. Selain akuntansi dalam perencanaan dan presentasi laporan keuangan yang harus dikomunikasikan kepada pengguna laporan keuangan, prosedur akuntan adalah implementasi khusus yang akan digunakan untuk menerapkan panduan tersebut. Sistem akuntansi sektor publik ini harus memiliki sistem pemantauan internal untuk pendapatan dan pengeluaran dari dana publik untuk memastikan kepatuhan dengan prosedur yang ditetapkan. Untuk memastikan

keandalan laporan keuangan, perlu untuk membangun benchmark untuk akuntansi. Standar akuntansi yang tidak memadai akan berdampak negatif pada keandalan dan objektivitas penjelasan data yang akan disajikan, ketidaksesuaian dalam laporan keuangan, dan tantangan audit.

Proses merumuskan dan menerapkan standar akuntansi untuk sektor publik ini sangat penting untuk pekerjaan akuntan, profesi akuntabilitas, dan semua pihak yang terlibat. Pengembangan standar ini dapat menguntungkan bagi satu pihak tetapi merugikan pihak lain. Menetapkan prosedur yang paling efektif untuk menentukan konsistensi standar akuntansi sangat penting untuk memastikan bahwa standar dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan dan juga dapat menguntungkan pertumbuhan organisasi akuntan sektor publik.

Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan di Sektor Publik

Akuntabilitas sektor publik sangat bergantung pada laporan keuangan. Peningkatan permintaan untuk akuntabilitas publik mengharuskan manajemen sektor publik memberikan informasi kepada publik, termasuk informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan. Dalam sektor publik, pelaporan keuangan bukanlah tujuan akhir akuntansi. Data keuangan berfungsi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi memfasilitasi akuntabilitas sektor publik dengan menentukan tujuan akhir sektor. Selain itu, akuntansi hanya terkait dengan pelaksanaan akuntabilitas keuangan. Apakah akuntan sektor publik dapat menyediakan data yang dapat digunakan untuk memantau akuntabilitas manajemen, akuntansi politik, dan akuntansi politik adalah ancaman yang mereka hadapi.

Karena kesulitan di sektor publik, persyaratan informasi untuk perencanaan dan pengawasan manajemen akan menjadi semakin beragam. Demikian pula, aktor sektor publik akan membutuhkan informasi yang lebih beragam, dapat diandalkan, dan relevan untuk membuat keputusan. Selain itu, adalah kewajiban dan tanggung jawab seorang akuntan sektor publik untuk menyajikan informasi untuk memenuhi kepentingan internal atau eksternal organisasi.

Fungsi utama akuntansi sektor publik adalah untuk menghasilkan laporan. akuntabilitas keuangan adalah salah satu jenis akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan didefinisikan sebagai proses mengumpulkan, menyusun, dan membahas informasi yang bermanfaat untuk membuat keputusan dan mengevaluasi kinerja organisasi. Transfer kebutuhan suatu fakta ke sektor publik yang lebih beragam membatasi fakta tersebut kepada fakta keuangan dan sistem akuntansi suatu organisasi. Selain meninjau informasi moneter, jumlah output layanan juga dievaluasi. Kembali ke pengambilan keputusan.

Dalam laporan keuangan sektor publik, kepatuhan dan manajemen dimasukkan dalam laporan keuangan organisasi sektor publik yang terstruktur dengan tujuan dan fungsi. Tujuan laporan keuangan adalah untuk meyakinkan konsumen dan pihak berwenang bahwa manajemen sumber daya telah dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Penggunaan laporan keuangan adalah salah satu bentuk akuntabilitas publik. Laporan keuangan digunakan untuk memantau kinerja dan manajemen yang benar dan dapat memberikan kebenaran untuk memonitor tren dari waktu ke waktu, pencapaian tujuan yang ditentukan

sebelumnya, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi yang sebanding, jika ada. Pihak ketiga juga dapat menafsirkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi berdasarkan informasi tentang rencana dan otorisasi sebagai hasil dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan berfungsi sebagai dasar untuk prosedur masa depan dan perencanaan kegiatan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tambahan tentang penggunaan dana yang sah dan perkembangan keberadaan organisasi.

Laporan keuangan membantu pembaca menentukan apakah organisasi atau entitas dapat terus menawarkan produk dan layanan di masa depan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk meningkatkan kesempatan bagi organisasi untuk menyajikan laporan kinerja kepada karyawan dan masyarakat umum. Laporan Keuangan berfungsi sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat umum dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya mengenai sumber data dan metrik. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan berbagai kelompok kepentingan dengan informasi yang mereka butuhkan untuk memahami sebuah organisasi.

Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai akuntansi teknis dan analitis. Rencana kolaborasi antara organisasi sektor publik dan swasta juga disertakan. Teori Akuntansi memiliki hubungan dekat dengan akuntansi keuangan, terutama laporan keuangan, yang merupakan bidang ketiga. Teori akuntansi memiliki tiga karakteristik fundamental: (1) kemampuan untuk menjelaskan peristiwa yang ada; (2) kemampuan untuk memprediksi peristiwa masa depan. (kemampuan mengendalikan fenomena).

Akuntan menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan untuk sektor publik. Sektor publik menghadapi banyak tantangan. Objektivitas, konsistensi, perbandingan, akurasi waktu, ekonomi pelaporan, dan materialisme adalah hambatan. Laporan keuangan di sektor publik sangat penting untuk membangun akuntabilitas sektor publik. Laporan keuangan organisasi di sektor publik dikumpulkan untuk tujuan dan fungsi tertentu. Kepatuhan dan manajemen adalah tujuan umum dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Tujuan laporan keuangan adalah untuk meyakinkan pengguna bahwa sumber daya telah dipelihara sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Tujuan dari laporan keuangan adalah akuntabilitas publik.

Laporan keuangan dirancang untuk memberikan cakupan komprehensif keuangan lokasi dan semua transaksi yang dilakukan selama periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan pendapatan, output, transfer, dan kinerja keuangan sesuai dengan aturan yang didefinisikan dan diterapkan, untuk menilai kondisi keuangan, untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi entitas pelaporan, dan untuk membantu menentukan kepatuhan entitas dengan peraturan yang berlaku. Selama periode pelaporan, setiap entitas dari entitas yang melaporkan harus mengkomunikasikan metode yang diterapkan dan hasil dari aplikasi kegiatan dengan cara yang sistematis dan terstruktur untuk kebutuhan spesifik.

Keuntungan akuntansi sektor publik sangat penting ketika menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan prosedur dan proses klasifikasi, pencatatan, dan pelaporan akun standar sesuai dengan arus atau arus bisnis organisasi sektor publik,

termasuk laporan, laporan keuangan, dan laporan akuntan. Akuntansi sektor publik menyajikan laporan akuntansi berkualitas, meningkatkan kinerja keuangan dan ekonomi, memungkinkan pemerintah untuk lebih fokus pada sektor mereka sendiri, dan membuat masyarakat lebih mandiri dan kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anik Yuesti, Ni Luh Putu Sandrya Dewi, and I Gusti Ayu Asri Pramesti, *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK*. Badung: CV. Noah Aletheia, 2020.
- [2] H. GUNAWAN, *Akuntansi Sektor Publik (Anggaran Sektor Publik)*. Yogyakarta: Andi.
- [3] Abdul Halim and Muhammad Syam Kusufi, *Muhammad Syam Kusufi*. Jakarta: Salemba Empat.
- [4] Indra Bastian, *Akuntansi sektor publik di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit BPFE Yogyakarta, 2001.
- [5] U. Santoso and Y. J. Pambelum, "Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud," *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2008.